

EVALUASI PROGRAM CETAK SAWAH DI KABUPATEN LINGGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

EVALUATION OF RICE PRINTING PROGRAM IN LINGGA REGENCY, RIAU ISLAND PROVINCE

Ardian Hasril¹, Adji Suradji Muhammad², Imam Yudhi Prasty³

^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Maritim Raja Ali Haji

²Program Magister Administrasi Publik Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang,
Kepulauan Riau

E-mail: ardianhasril240799@gmail.com, suradji@umrah.ac.id, yudhiimam@umrah.ac.id

Abstrak: Kebijakan cetak sawah bertujuan untuk menjadikan Kabupaten Lingga sebagai lumbung padi di wilayah perbatasan dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Lingga. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode purposive sampling dalam memilih responden. Menggunakan teori Willian N Dunn maka terdapat 6 indikator yang digunakan untuk melakukan evaluasi program yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Keadilan, Responsivitas, dan Ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program cetak sawah di Kabupaten Lingga belum optimal. Ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan program, diantaranya saluran irigasi yang masih belum memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya petani yang belum memiliki keyakinan atas usaha barunya dan Sumber Daya Alam (SDA) khususnya kualitas tanah dan iklim.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Cetak Sawah di Kabupaten Lingga

Abstract: This rice paddy printing policy aims to make Lingga Regency as a rice barn in the border region and fill up the needs of the people of Lingga Regency. In the implementation, there are still inhibiting factors for irrigation channels that were still not fully available the Human Resources (HR) and Natural Resources (NR). So, it is necessary to consider again the printing of rice fields in the future. The purpose of this study was to evaluate the policy of paddy printing and to find out the inhibiting factors for paddy printing in Lingga Regency. This research was used descriptive with a qualitative approach with purposive sampling method. In evaluating the rice field printing program, researchers used Willian N Dunn's theory which has 6 indicators consisting of Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Fairness, Responsiveness, and Accuracy. The results of the study were assessed from the effectiveness indicators that were not effective because the expected results were not appropriate and there were still rice fields were not available for irrigation. Meanwhile, from the efficiency point of view, it is sufficient as a tool in the implementation of rice field printing which is very adequate for implementation. Then, sufficiency is still not enough because the results obtained deviate from the target. Judging by justice, it is not evenly distributed since not all areas are participating, not all regions have land, and not all farmers are interested. From the responsiveness of the motivation and the response of the community it weakens because the results obtained are not optimal. From the accuracy of this program it is not right on target and needs to be investigated again. The conclusion in running the rice field printing program in Lingga Regency has not run optimally because it is still far from expectations and is constrained by irrigation channels that are not owned by several rice fields and continuity from the central government as well as Natural Resources (NR) and Human Resources (HR).

Keywords: : Evaluation, Policy, Rice Field Printing in Lingga Regency

PENDAHULUAN

Menurut Soepono merupakan salah satu negara berkembang dengan potensi pertanian sebagai awal mata

pencarian dari sebagian besar masyarakatnya dengan begini separuh masyarakatnya mengandalkan dirinya pada potensi pertanian. Sektor pertanian adalah salah satu potensi yang masih saa

ini diandalkan bagi oleh negara Indonesia berkat sektor pertanian sanggup mempersempit pemulihan dalam mengendalikan krisis pertanian sebagai salah satu sektor yang handal dan memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai dorongan pemulihan ekonomi nasional.(Abdul Hafis, 2017)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2009 pasal 1 angka (8) Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.

Kehadiran dan kesiapan lahan sawah mempunyai kapasitas strategis bagi Indonesia yang sebagian besar makanan pokok masyarakat adalah beras. Disamping sebagai asal muasal produksi pangan kepada mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. Lahan sawah juga mempunyai dampak positif yang beragam bermakna menjunjung pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari pembukaan lahan sawah ialah sebagai stabilitas suplai pangan khususnya beras, mengendalikan keserasian ekologis, vitalitas ekonomi dan sosial penduduk dan kawasan perdesaan, penyangga identitas, dan warisan budaya bersama pelestari nilai-nilai estetika dan spiritual religius(I Putu Sriartha dan Wayan Windia, 2017)

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi, serta peningkatan kebutuhan pangan menyebabkan upaya mencapai ketahanan pangan nasional di masa mendatang menjadi semakin berat. Apalagi ditunjang dengan kenyataan bahwa penyediaan pangan lokal belum mampu memenuhi permintaan pangan nasional. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya permintaan dan turun naiknya produksi dan produktivitas pangan nasional. Dengan kata lain, produksi pangan sangat dipengaruhi iklim,

apalagi sekarang ini pertanian dihadapkan pada fenomena iklim yang tidak menentu sebagai akibat terjadinya perubahan iklim (climate change). Tantangan berikutnya yang harus dihadapi oleh sektor pertanian adalah semakin tergerusnya lahan-lahan pertanian oleh aktivitas ekonomi manusia, terutama untuk permukiman, pembangunan infrastruktur (jalan, bendungan, dan sebagainya), ataupun industri.(Anwar Sunari, 2015)

Pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh ketersediaan faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi tersebut dapat berupa sumber daya alam (tanah atau lahan, sinar matahari dan lain-lain), barang modal (berupa barang, mesin atau uang), tenaga kerja, dan keahlian (managerial skill atau technical skill). Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan, serta jumlah dan hasil kekayaan tambang. Pertanian mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah. Peran pertanian dalam suatu negara berbeda-beda dengan negara lainnya, negara berkembang tergolong negara agraris yaitu negara yang penghasilan rakyatnya sebagian besar dari sektor pertanian.(Rio Kurniawan Samin, 2013)

Pembangunan (termasuk sektor pertanian) di Indonesia lebih menekankan pada pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan di masa mendatang, diperlukan orientasi paradigma pembangunan, baik dari segi arah, strategi maupun kebijakan. Pertanian tidak hanya sebatas pertanian dalam artian sempit, namun dalam artian luas yaitu penghasil produk primer yang terbarukan, termasuk di dalamnya pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Peranan pertanian dapat menyediakan kebutuhan bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjamin ketahanan pangan, menyediakan bahan baku industri, sebagai

pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri, sumber tenaga kerja dan pembentukan modal yang diperlukan bagi pembangunan sektor lain, sumber perolehan devisa, mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan, dan menyumbang pembangunan perdesaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Kehadiran dan kesiapan lahan sawah mempunyai kapasitas strategis bagi Indonesia yang sebagian besar makanan pokok masyarakat adalah beras. Disamping sebagai asal muasal produksi pangan kepada mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional secara berkelanjutan. Lahan sawah juga mempunyai dampak positif yang beragam bermakna menjujung pembangunan berkelanjutan. Fungsi dari pembukaan lahan sawah ialah sebagai stabilitas suplai pangan khususnya beras, mengendalikan keserasian ekologis, vitalitas ekonomi dan sosial penduduk dan kawasan perdesaan, penyangga identitas, dan warisan budaya bersama pelestari nilai-nilai estetika dan spiritual religious. (I Putu Sriartha dan Wayan Windia, 2017)

Luas wilayah sebesar 252.601 Km², dimana sekitar 96% merupakan lautan dan hanya sekitar 4% merupakan wilayah darat. Kondisi luas daratan Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 hanya 4% dan jauh dominan dengan lautan. Hal ini tidak membuat daerah Kabupaten Lingga yang merupakan salah satu daerah dari Provinsi Kepulauan Riau untuk membuka lahan pertanian meskipun kondisi geografis tidak memadai.

Program cetak sawah di Kabupaten Lingga ini merupakan kerja sama antara Kementerian Pertanian dan TNI AD perjanjian kesepakatan kerja sama (41/RC.210/B.1/01/2014) ini merupakan agenda prioritas pembangunan di wilayah perbatasan yaitu sektor pertanian hal ini merupakan

langkah-langkah terobosan dilakukan pemerintah agar sektor pertanian bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003 dapat diartikan bahwa luas lautan Kabupaten Lingga lebih besar jika dibandingkan dengan luas daratan, dengan kata lain luas laut di Kabupaten Lingga lebih dominan dengan daratan. Secara logika dengan melihat kondisi luas wilayah daerah Kabupaten Lingga kurang tepat mendirikan pertanian melihat kondisi laut yang jauh lebih dominan dengan daratan apa lagi masyarakat setempat lebih terbiasa mengelola sagu.

Berdasarkan Observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang kebijakan cetak sawah Pemerintah Kabupaten Lingga melalui Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan dengan semangatnya membuka lahan pertanian sebagai bukti pemerintah Kabupaten Lingga sendiri untuk menghilangkan mitos lama dari semula defisit dan impor pangan kini bergerak menjadi lumbung pangan perbatasan yang sebenarnya masyarakat setempat lebih mahir pada pengelolaan sagu dan berprofesi lebih sering melaut. pembuktian program cetak sawah ini dilakukan tepatnya bulan Maret di Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara resmi membuka lahan pertanian dengan luas sawah 100 Harvested Area (Ha) dan tepatnya lagi bulan Agustus di Desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur resmi membuka lahan sawah kembali yang semulanya 350 Harvested Area (Ha) untuk tahap awal karena memiliki kendala dari anggaran di pusat sehingga 100 Harvested Area (Ha) yang terealisasi bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berkerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) dan Kementerian Pertanian.

Dengan pembukaan lahan sawah di Desa-Desa Kabupaten Lingga

merupakan sebuah pembuktian bahwasanya dengan luas daratan yang jauh lebih dominan laut dapat mendirikan sebuah lumbung padi dan di tahun berikutnya data luas lahan sawah yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Lingga.

Pembukaan lahan sawah sudah dimulai dari tahun 2016. Dari tahun 2016 sudah ada dua desa yang melakukan pembukaan lahan sawah yang pertama di desa Bukit Langkap Kecamatan Lingga Timur dan yang kedua adalah desa Resang Kecamatan Singkep Selatan dengan total di buka lahan sawah 148 Harvested area (Ha) kemudian berlanjut pada tahun 2017 pemerintah kembali membuka lahan sawah terdapat empat desa yaitu di desa Panggak Darat dan Panggak Laut di kemudian disusul desa Nerekeh Kecamatan Lingga, kemudian berlanjut dibuka lagi di desa Resang dan desa Marok Kecil Kecamatan Singkep Selatan dengan total 586 Harvested area (Ha) artinya ada peningkatan pembukaan lahan sawah di tahun 2017, kemudian di tahun 2018 di buka kembali lahan sawah terdapat tiga desa yaitu desa Sungai Besar Kecamatan Lingga Utara, disusul oleh desa Lanjut Kecamatan Singkep Pesisir dan yang terakhir pembukaan lahan sawah di desa Kerandin Kecamatan Lingga Timur dengan total di tahun terakhir 209,95 Harvested area (Ha) artinya ada penurunan pembukaan lahan sawah ditahun 2018. Kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lingga dalam pembukaan lahan sawah bersumber dari dana anggaran APBN.

Hasil panen kegiatan cetak sawah pada tahun 2017 hasil panen cetak sawah dari keseluruhan sawah yang berada di tiap desa hanya 5.05 Ton ini, Sedangkan di 2018 yaitu dengan 98.04 Ton ,

kemudian di Tahun 2019 94.02 Ton dan kemudian di Tahun 2020 luas panen mencapai 172.99 Ton.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan guna mengevaluasi kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Lingga dan bergerak menjadi lumbung pangan diwilayah perbatasan. Proses pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Adapun teknik pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi program sangat penting artinya untuk memberikan informasi mengenai keterlaksanaan program yang bersangkutan. Evaluasi program berfungsi membantu mengontrol pelaksanaan program agar dapat diketahui tindak lanjut apa yang harus dilakukan dari pelaksanaan program. Evaluasi juga menjawab pertanyaan sejauh mana program berhasil mencapai tujuan sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat keputusan apakah program diberhentikan, dilanjutkan, atau diperbaiki.(Akbar, 2016)

Berikut dibawah ini merupakan tabel lokasi desa, kelompok tani, dan luas lahan sawah yang tersebar di Kabupaten Lingga pembukaan lahan ini dimulai dari tahun 2016-2018.

Tabel 1. Data Luas Lahan Sawah Kabupaten Lingga

No	Desa/Kecamatan	Poktan	Luas Sawah (Ha)
1	Panggak Darat/Lingga	Tunas Muda	34.5
		Tunas Jaya	34.5
		Padat Karya	34.5
		Sumber Rezeki	31.5
2	Panggak Laut/Lingga	Usaha Baru	39.3
		Harapan Baru	38.2
		Usaha Mandiri	36.2
		Karya Tani	39.3
3	Nerekeh/Lingga	Parit I	30.18
		Parit II	30.18
		Parit III	29.64
4	Resang/Singkep Selatan	Bestari I	54
		Bestari II	49
		Bestari III	68
		Bestari IV	70
5	MarokKecil/Singkep Selatan	Langkap Jaya I	70
6	Bukit Langkap/Lingga Timur	Jayatu	20
		Pangestu	25
7	Desa Sungai besar/Lingga	Berkah Jaya	24.6
		Penuh Berkah	34.1
		Hijau Berdaun	28.8
8	Desa Lanjut/Singkep Pesisir	Jaya	9.85
		Makmur	21.3
9	DesaKerandin/Lingga Timur	Suka Damai	55
		Suka Tani	36.3
Jumlah			943.95
Luas Cetak Sawah Pihak Luar Pemerintah di Sungai Besar			34.5
Total keseluruhan			978.45

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas menunjukkan Sembilan desa telah membuka lahan cetak sawah dengan total seluruh desa yang ada di Kabupaten Lingga mencapai 978.45 Ha. Kecamatan yang memiliki paling luas wilayah cetak sawah nya yaitu Desa Resang 241 Ha

kemudian disusul Desa Panggak Laut dengan 153 Ha.

Berikutnya menggambarkan jumlah petani yang ada dilokasi tiap desa sawah yang tersebar di desa/kecamatan yang ada di Kabupaten Lingga

Tabel 2. Jumlah Petani Padi Sawah Kabupaten Lingga

No	Desa/Kecamatan	Jumlah Petani Padi Sawah
1.	Panggak Darat/Lingga	125
2.	Panggak Laut/Lingga	136
3.	Nerekeh/Lingga	116
4.	Resang/Singkep Selatan	160
5.	MarokKecil/Singkep Selatan	291
5.	Bukit Langkap/Lingga Timur	152
6.	Desa Sungai Besar/Lingga Timur	99
7.	Desa Lanjut/Singkep Pesisir	46
8.	DesaKerandin/Lingga Timur	87
.Total		1.212

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021

Dari tabel 2 diatas menjelaskan sebaran petani padi sawah yang berada di tiap desa/kecamatan Kabupaten Lingga. Dapat dilihat petani terbanyak terletak di desa Marok Kecil Singkep Selatan diikuti, Resang Singkep Selatan, dan Bukit Langkap Lingga Timur. Kemudian

jumlah petani di desa paling kecil ada di desa Lanjut Singkep Pesisir. Total keseluruhan jumlah petani yang tersebar ada 1.212 (Seribu dua ratus dua belas). Berikutnya tabel 3 dibawah ini adalah kebutuhan konsumsi beras seluruh masyarakat Kabupaten Lingga

Tabel 3. Kebutuhan Beras Masyarakat Kabupaten Lingga 2021

No	Bulan	Ton
	Januari	764
	Febuari	764
	Maret	764
	April	766
	Mei	799
	Juni	764
	Juli	765
	Agustus	764
	September	764
	Oktober	764
	November	764
	Desember	765
Total		9,210

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lingga 2021

Dari tabel 3. diatas merupakan data kebutuhan konsumsi beras masyarakat Kabupaten Lingga dari bulan

januari sampai desember ditahun 2021 dengan total 9,210 Ton beras yang dibutuhkan. Kebutuhan beras terbanyak

berada dibulan Mei dan kebutuhan beras paling rendah bulan januari, febuari, maret, juni, agustus, september, oktober, dan november.

Pembukaan lahan sawah Kabupaten Lingga merupakan program kerja sama antara Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Angkatan Darat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten Lingga diwilayah perbatasan. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan tersebut perlu adanya pelaksanaan dan pengevaluasian dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam melakukan evaluasi kebijakan cetak sawah tentunya peneliti menggunakan jenis evaluasi formatif karena evaluasi formatif ini sesuai dengan kebijakan atau program yang akan diteliti karena kebijakan ini masih berjalan untuk mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat berlangsung, sekaligus dapat mengidentifikasi hambatan. Hasil evaluasi ini biasanya meliputi permasalahan dalam pelaksanaan. Dalam mengevaluasi tentunya ada standart yang digunakan dalam pengevaluasian pelaksanaan kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga Hal ini dapat dilihat dari indikator evaluasi yang dikemukakan oleh William N Dunn yaitu, efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan.

1. Efektivitas William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik: Edisi Kedua, menyatakan bahwa Efektivitas (effectiveness) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter(Dunn., 2003:429) Hal ini sesuai dengan pendapat(Agus Ikwanto, Yusuf, 2019) keberhasilan program dianalisa dari berbagai sudut pandang

dihadapkan dengan hasil terhadap program ini telah memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasrakan dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa hasil pelaksanaan cetak sawah di Kabupaten Lingga masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dikarenakan dalam memang masih banyak terdapat kekurangan selain dari kurangnya minat masyarakat dan hasil yang diperoleh pun belum cukup memenuhi kebutuhan masyarakat setempat namun hasil panen tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lingga tersebut dan juga belum bisa mencapai tujuan dari pembukaan lahan sawah ini belum mampu menjadi lumbung pangan diwilayah perbatasan.

2. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. William N. Dunn berpendapat bahwa Efisiensi (efficiency) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.(Dunn., 2003:430) Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa efisiensi dari kebijakan cetak sawah ini menghasilkan hasil yang baik dengan kualitas beras yang baik. Dalam pelaksanaan wawancara peneliti menemukan bibit padi yang diberikan pemerintah pusat bibit unggulan dan bantuan yang diberikan itu tidak diberikan secara terus menerus petani diharapkan juga bisa mandiri bagaimana mereka bisa berdaya dan tidak mengharapkan bantuan secara

- terus menerus. Supaya hasil yang diharapkan sesuai target diperlukan usaha yang lebih keras lagi.
3. Efisiensi yang seharusnya dihasilkan supaya sesuai target kebutuhan beras dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan (adequacy) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah (Dunn., 2003:430) Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa kecukupan masih terkendala dengan hasil panen yang kurang memadai dan jauh dari kata cukup sedangkan untuk alat penunjang cetak sawah serta sarana dan prasarana sudah bisa dikatakan mencukupi. Jadi berdasarkan hasil panen sudah ada tetapi masih jauh dari kata cukup sedangkan fasilitas yang diberikan sudah sangat mencukupi dalam pelaksanaan kebijakan cetak sawah hingga panen.
 4. Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai arti sama dengan keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. William N. Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan (equity) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat (Dunn., 2003:434) Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu masyarakat Lingga. Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah keadilan atau kewajaran. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa keadilan disini dari kebijakan cetak sawah belum sepenuhnya merata. Masih banyak masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaannya. Hanya masyarakat yang memiliki lahan dan tidak semua desa juga memiliki lahan dan petani. Masyarakat lebih menyukai bekerja yang kesehariannya dilakukan. Pola pikir inilah yang sulit untuk diubah oleh pemerintah daerah khususnya. Apalagi hasil produksi cukup rendah yang belum cukup memenuhi kebutuhan sampai-sampai masyarakat Kabupaten Lingga masih banyak belum merasakan beras daerah sendiri.
 5. Responsivitas dalam kebijakan publik berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu kebijakan. Menurut William N. Dunn responsivitas (responsiveness) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu (Dunn., 2003:437) Keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat atas pelaksanaannya setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan. Tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dapat dalam bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Dunn pun mengemukakan bahwa kriteria responsivitas adalah penting karena analisis yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum

menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan. Dari hasil penelitian dapat dilihat dari Responsivitas dalam masalah dilahan, motivasi masyarakat menurun, dan keterampilan masyarakat yang minim dan pola pikir masyarakat yang ingin instan hasilnya. Sedangkan pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan. Dan penangan nya masih belum dilakukan secara terus menerus sehingga masalah yang terjadi dilapangan selalu ditemukan ini dan masih ada petani yang mengeluhkan saluran irigasi pemerintah juga menyekolahkan para anak daerah di bidang pertanian di Malang dan Yogyakarta serta juga bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor program D1 di Lingga yang mana lulusan ini langsung bekerja untuk membantu mengelola padi sawah ini.

6. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. William N. Dunn menyatakan bahwa kelayakan (Appropriateness) adalah: “Kriteria yang dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan dengan rasionalitas substantif, karena kriteria ini menyangkut substansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk merealisasikan tujuan tersebut (Dunn., 2003) Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa dari ketepatan dalam kebijakan cetak sawah ketepatan tidak tepat sasaran ditemukan kendala dalam pelaksanaan kebijakan cetak sawah ini lahan dan tanah memang sudah tersedia tetapi masih ditemukan Ph tanah yang tinggi dengan zat asam dan dipengaruhi

kebijakan cetak sawah dapat dilihat masyarakat merespon dengan baik walaupun tidak seluruhnya untuk respon masyarakat menurun karena ada yang gagal panen karena memiliki juga sumber daya manusia (SDM) yang kurang berminat dan tidak mempunyai skil dibidang pertanian. Belum lagi ditemukan masih tidak tersedianya beberapa sawah saluran irigasi yang memadai. Sedangkan saluran irigasi ini merupakan hal yang sangat penting dalam menumbuhkan padi dan ada juga ditemukan kontinuitas program dari pemerintah pusat yang tidak selesai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan cetak sawah di Kabupaten Lingga dalam pelaksanaan terdapat faktor penghambat dikarenakan masih banyaknya temuan permasalahan dilapangan hasil yang diperoleh belum optimal. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan mencapai tujuan dari kebijakan cetak sawah memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat Kabupaten Lingga dan menjadi lumbung pangan diwilayah perbatasan

1. Dari indikator efektivitas, pencapaian dari indikator efektivitas dalam kebijakan cetak sawah saat ini belum bisa dikatakan berhasil karena hasil wawancara dengan beberapa informan, dapat dikatakan kebijakan cetak sawah ini belum berjalan efektif. Karena masih banyak terdapat kekurangan. Dimana kurang minatnya masyarakat, hasil yang didapat dari kebijakan ini belum bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat maupun masyarakat yang berada diseluruh Kabupaten Lingga.
2. Dari indikator efesiensi, berdasarkan hasil dari wawancara dengan informan efesiensi dari kebijakan cetak sawah

- menghasilkan kualitas beras yang bagus karena terbukti dari petani yang diwawancarai salah satu petani mendapatkan sertifikasi benih dalam acara kegiatan penangkaran benih. harusnya dilakukan supaya sesuai target per 1 Heakter sawah bisa menghasilkan 5,1 Ton untuk produktivitas di Indonesia, sedangkan untuk wilayah Kepulauan Riau produktivitas 1 Heakter 2,8 Ton.
3. Dari indikator kecukupan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan untuk indikator kecukupan masih jauh dari kata cukup karena hasil panen yang rendah. Sedangkan untuk bantuan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah sudah sangat mencukupi dari alat untuk cetak sawah sampai tempat penggilingan beras saat panen.
 4. Dari indikator keadilan, berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang berkaitan dengan keadilan dapat dikatakan masih banyak masyarakat yang tidak ikut terlibat dalam proses pelaksanaan tidak semua desa memiliki lahan dan calon petani. Apalagi pola pikir masyarakat yang sulit diubah oleh pemerintah. Didukung lagi dengan hasil produksi dari cetak sawah yang rendah sampai masyarakat didesa setempat yang ada lahan sawah masih ada yang belum merasakan hasilnya.
 5. Dari indikator responsivitas, dari hasil wawancara dari beberapa informan. Masyarakat merespon dengan baik walaupun tidak sepenuhnya. Respon dan motivasi masyarakat menurun karena hasil yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan, keterampilan yang minim dalam mengelola cetak sawah. Sedangkan pemerintah selalu cepat tanggap dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dilapangan namun permasalahan yang diatasi tidak berkelanjutan. Cuma yang masih menjadi kendala masih ada ditemukan kendala kebijakan tidak tersedianya irigasi, masih ada para petani yang

Walaupun pemerintah telah menyediakan bibit yang merupakan kualitas unggulan. Tapi supaya hasil didapatkan pada target, perlu usaha yang lebih keras lagi. Efisiensi yang mengeluhkan saluran irigasi yang tidak memadai.

6. Dari indikator ketepatan berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan mengenai ketepatan untuk kebijakan cetak sawah ini perlu pertimbangan lagi karena masih ditemukan kendala baik berupa SDA,SDM, pola pikir serta masih ada terkendala beberapa desa terkendala irigasi serta program kontiunitas pusat yang tidak selesai.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anwar Sunari (2015) *Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan (LP2B)*. Jakarta Pusat: Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Dunn., W. N. (2003) *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Dua. Gadjah Mada University Press.

ARTIKEL JURNAL

- Abdul Hafis (2017) 'Perubahan Mata Pencharian Masyarakat dari Petani ke Pengrajin Batu Bata di Dusun Dasan baru Desa Lenek Daya Kecamatan Aikmel dalam Tinjauan Ekonomi', *Jurnal Jurusan Pendidikan IPS Ekonomi*.
- Agus Ikwanto, Yusuf, H. . H. (2019) 'Evaluasi Program Cetak Sawah oleh Korem 174/ATW di Marauke dalam Mendukung Ketahanan Pangan Nasional', *Jurnal Strategi Perang Semesta*, 5.

Akbar, M. F. (2016) 'Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah', *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2.

Kabupaten Badung, Bali', *Jurnal Kajian Bali*, 05.

Rio Kurniawan Samin (2013) 'Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan Kota Tanjung Pinang', *Jurnal Ilmu administrasi Negara*.

I Putu Sriartha dan Wayan Windia (2017) 'Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Mengendalikan Alih Fungsi Lahan Sawah Subak: Studi Kasus di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Pasal 1 angka(8) Pertanian Pangan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 Kementerian Pertanian dan TNI AD perjanjian kesepakatan kerja sama (41/RC.210/B.1/01/2014) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2003

DOKUMEN